

KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT: DHAUP AGENG SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN BUDAYA TAHUN 2011-2013

Dytha Adelia Indryani, Nur'aeni Martha, Kurniawati

Pendidikan Sejarah Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
dythadeliabd@gmail.com, nuraeni@unj.ac.id, kurniawati@unj.ac.id

Abstrak

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan poros dari adat istiadat Yogyakarta yang memiliki kewajiban untuk selalu melestarikan tradisi yang dimiliki. Salah satu tradisi yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia maupun dunia adalah warisan budaya adiluhung yaitu ritual upacara perkawinan yang disebut *dhaup ageng*. *Dhaup ageng* yang dilakukan Karaton Yogyakarta meskipun bersifat feodal namun tetap dianggap positif karena kekonsistenan Karaton Yogyakarta untuk mempertahankan adat istiadat sejak jaman Kesultanan Mataram Islam hingga masa kini di tengah gempuran modernitas. *Dhaup ageng* di Karaton Yogyakarta memiliki prosesi yang sarat akan makna sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengikutinya. Artikel ini akan membahas tentang prosesi pada upacara ritual pernikahan (*dhaup ageng*) di Karaton Yogyakarta serta makna dari prosesi tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan studi sejarah kebudayaan menurut Mc Cullagh, dimana penulis mencoba mengkaji makna dari sebuah tindakan dan objek material dengan metode deskriptif-naratif. Hasil dari pembahasan pada artikel ini adalah telah terbukti bahwa *dhaup ageng* di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berperan penting dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya adiluhung Yogyakarta, terutama di tengah arus modernitas serta diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda agar selalu menjaga warisan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta dengan bangga mengenalkannya ke dunia internasional.

Kata kunci: warisan budaya adiluhung, *dhaup ageng*, pelestarian budaya.

Abstract

The Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat serves as the central axis of Yogyakarta's customs and traditions, bearing the responsibility of preserving its rich cultural heritage. One of the most renowned traditions, both in Indonesia and internationally, is the dhaup ageng, a grand royal wedding ceremony. Although dhaup ageng is deeply rooted in feudal customs, it is still regarded positively due to the Yogyakarta Palace's unwavering commitment to maintaining traditional practices from the era of the Mataram Islam Sultanate to the present, despite the pressures of modernity. The dhaup ageng ceremony is filled with profound symbolic meanings, making it an attraction for the public to witness and appreciate. This article examines the dhaup ageng ritual in the Karaton Yogyakarta, focusing on its ceremonial processes and their underlying meanings. The author employs a historical research method with a cultural history approach based on McCullagh's perspective, seeking to interpret the meanings embedded in actions and material objects through a descriptive-narrative method. The findings of this study confirm

that dhaup ageng in the Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat plays a crucial role in preserving and safeguarding Yogyakarta's noble cultural heritage, particularly in the face of modernization. Furthermore, it is hoped that this tradition will inspire younger generations to uphold Indonesia's cultural legacy with pride and promote it on the international stage.

Keywords: *noble cultural heritage, dhaup ageng, cultural preservation.*

PENDAHULUAN

Karaton Yogyakarta yang merupakan poros budaya Yogyakarta masih mempertahankan tradisi pernikahan yang dimilikinya, meskipun pernikahan terakhir yang dilakukan oleh Karaton Yogyakarta adalah pernikahan putri keempat Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tahun 2013 namun *the royal wedding* ala Karaton Yogyakarta ini memiliki makna mendalam bagi upaya pelestarian budaya. Secara umum ritual upacara perkawinan di Karaton Yogyakarta memiliki kesamaan dengan ritual upacara perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya, namun dalam ritual upacara perkawinannya, Karaton Yogyakarta memiliki sebuah prosesi yang sakral dan hanya boleh dilakukan oleh pihak keluarga raja yang bertahta yaitu *pondhongan* merupakan rangkaian dari upacara adat *panggih*.

Menurut KBBI, tradisi adalah adat kebiasaan, turun-temurun, dari nenek moyang masih dijalankan dalam masyarakat sedangkan pernikahan adalah sebuah upacara pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam prosesi ritual upacara perkawinan tentu beragam dan bervariasi sesuai dengan tradisi suku bangsa, agama, budaya dan juga kela sosial. “Jadi tradisi pernikahan adalah adat kebiasaan tentang tata upacara perkawinan yang turun temurun dan masih dilakukan dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama. Tradisi pernikahan bagi Karaton Yogyakarta merupakan sebuah ritual keagamaan.” (Darban Ahmad Adaby, 2002)

Pernikahan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara yang merupakan putri kelima dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dilaksanakan pada tanggal 16-19 Oktober 2011 menjadi sorotan dunia dan mendapat julukan *the royal wedding* layaknya pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton. Sorotan terhadap pernikahan GKR Bendara bukan hanya karena kemegahan dalam ritual upacara yang diadakan 4 hari berturut-turut saja melainkan juga karena Karaton Yogyakarta

tetap melaksanakan prosesi adat pernikahan sesuai dengan karakter tradisional namun dilakukan di zaman modern.

Rangkaian ritual upacara perkawinan GKR Bendara diawali dengan *nyantri, siraman, tantingan, midodareni, upacara panggih* yang terdapat prosesi *pondhongan, tompo koyo dhahar klimah, kirab* dan diakhiri dengan resepsi. Prosesi pernikahan GKR Bendara sebenarnya sudah dimulai sejak 40 hari sebelum acara pernikahan itu sendiri berlangsung, dimulai dengan prosesi *nyantri* dimana sang mempelai laki-laki *mondok* di Karaton. Tujuan dari prosesi tersebut adalah agar sang mempelai laki-laki mengetahui seluk beluk kehidupan Karaton serta adat istiadatnya, terlebih calon suami dari GKR Bendara merupakan sosok yang bukan berasal dari lingkungan Karaton tetapi merupakan pria kelahiran Lampung.

Hal menarik lainnya dari pernikahan GKR Bendara adalah sebagai putri bungsu GKR Bendara melangkahi sang kakak, yaitu putri keempat Sri Sultan Hamengkubuwono X yang pada saat itu bergelar Gusti Raden Adjeng (GRAj) Nurabra Juwita, sesuatu yang membuktikan bahwa Karaton bukanlah institusi yang kaku melainkan dinamis dapat mengikuti perubahan sesuai dengan zamannya. Karaton Yogyakarta yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Mataram Islam membolehkan sang adik melangkahi sang kakak untuk menikah karena dalam konsepsi jodoh dalam agama Islam merupakan rahasia Tuhan sehingga tidak dapat diatur oleh manusia, hal ini berbeda dengan prinsip Kesultanan Mataram Islam terdahulu dimana proses melangkahi seorang kakak untuk menikah adalah hal yang tabu dan melanggar pakem.

Prosesi dalam ritual upacara perkawinan Karaton Yogyakarta yang sarat akan makna sangat menarik untuk dikaji, agar kita mengerti maksud dari setiap prosesi yang dilakukan. Artikel ini akan berusaha melakukan *thick description* atau deskripsi mendalam terhadap setiap prosesi ritual upacara perkawinan agar mengetahui makna-makna sosial yang tersembunyi. Artikel ini bertujuan agar setelah mengetahui makna sosial yang tersembunyi dari setiap prosesi maka para pembaca dapat terinspirasi untuk ikut melestarikan tradisi ini sehingga tidak tergerus oleh modernisasi dan tradisi ini tetap menjadi warisan budaya adiluhung yang dikenal oleh masyarakat internasional.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penulisan sejarah yang mengacu pada sistematisasi penelitian Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah meliputi lima tahap, yaitu pemilihan topik, *heuristik* atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau analisis dan sintesis dan terakhir historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 1994). Selain itu pendekatan dalam penulisan artikel, penulis menggunakan metode deskriptif-naratif.

Pemilihan topik artikel berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual, kedekatan emosional adalah karena topik artikel ini terinspirasi dari skripsi yang penulis tulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di program studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan pemilihan topik berdasarkan kedekatan intelektual karena penulis memiliki ketertarikan terhadap sejarah kebudayaan dan berharap dapat memberikan khasanah pengetahuan baru dalam bidang sejarah budaya.

Pada tahap *heuristik* atau pengumpulan sumber, penulis mengumpulkan sumber primer berupa wawancara dengan tokoh yang relevan dengan penelitian, seperti Profesor Djoko Suryo yang merupakan sejarawan ahli Karaton Yogyakarta sekaligus guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sumber lisan kedua adalah kerabat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X yaitu sang kakak KRT Pujaningrat dan sang adik KRT Djatiningrat. Selain sumber primer, penulis juga mencaai sumber sekunder seperti buku *Tahta Untuk Rakyat, Dhaup Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Perubahan Sosial di Yogyakarta, Yogyakarta Tempo Doeloe Sepanjang Catatan Pariwisata, Kraton Jogja: The History and Cultural Heritage* serta berita sezaman dalam surat kabar *online* seperti *Media Indonesia, Kompas* dan *Kedaulatan Rakyat*. Dalam tahap verifikasi, penulis melakukan kritik sumber terhadap berita dalam surat kabar dengan melakukan konfirmasi kepada para narasumber ahli seperti kerabat dan guru besar UGM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Poros Kebudayaan Yogyakarta

“Karon merupakan sebuah kata yang diambil dari kata “ratu” (raja), menunjuk kepada tempat kediaman ratu atau raja”(Jandra M, 1991). “Karon Yogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755” (Darban Ahmad Adaby, 2002). Selama masa penjajahan Belanda sampai masa pendudukan Jepang, Karon Yogyakarta mempertahankan gaya feodalismenya dan mulai mengurangi gaya feodalisme tersebut sejak Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Sultan HB IX) bertahta. Itu erat dikaitkan dengan keputusan Sultan HB IX yang mengintegrasikan Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada awal kemerdekaan yang merupakan bukti kesetiaan Karon terhadap republik. Menyadari keputusannya maka Sultan HB IX harus mengurangi sifat feodalistis dari Karon Yogyakarta sebagai konsekuensi logis dari masuknya wilayah Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI.

Yogyakarta ketika masa pendudukan Jepang berada di bawah kepemimpinan Sultan HB IX yang telah naik tahta ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1940, setahun setelah ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mangkat (Lombard Denys, 2000). Meskipun ketika Jepang masuk ke Indonesia Sultan HB IX belum berpengalaman, tetapi mampu memainkan peran dengan sangat baik. Sultan HB IX mampu memperdayai Jepang sehingga tidak menjadikan rakyat Yogyakarta sebagai *romusha*.

Perang Asia Timur Raya mengalami *turning point* pada tahun 1945 dimana keadaan berbalik menjadi begitu merugikan bagi blok fasis dan berakhir dengan kekalahan Jepang yang mengharuskan Jepang menyerah terhadap tentara sekutu (Seomardjan Selo, 2009). Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Yogyakarta dan diketahui oleh Sultan HB IX. Selanjutnya, tanpa ada keraguan Sultan HB IX segera mengirimkan telegram kepada kedua proklamator

kemerdekaan Soekarno dan Hatta serta ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan yang merupakan ucapan selamat atas terbentuknya negara Republik Indonesia (Atmakusumah, 2011).

Langkah selanjutnya yang diambil oleh Sultan HB IX adalah kembali mengirimkan telegram kepada presiden dan wakil presiden RI pada tanggal 20 Agustus 1945 dengan kedudukan Sultan HB IX sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (*hokokai*) Yogyakarta. Telegram tersebut mengatakan bahwa Yogyakarta dibawah kepemimpinannya “sanggup berdiri di belakang pimpinan” mereka (Atmakusumah, 2011). Keputusan Sultan HB IX untuk mengintegrasikan wilayah Yogyakarta masuk menjadi bagian dari NKRI dibuktikan dengan aktif dalam keikutsertaan dalam pemerintahan RI, puncaknya adalah mengizinkan Yogyakarta menjadi ibukota sementara RI ketika masa revolusi, hal itu menunjukkan sosok kenegarawanan Sultan HB IX.

Bergabungnya Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam ke dalam NKRI menjadikan Kesultanan mendapat sebuah status sebagai daerah istimewa. Status keistimewaan yang dimaksud adalah status yang diberikan kepada Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah NKRI dan memiliki otonomi khusus sebagai sebuah kesultanan. Penjelasan mengenai status Kesultanan Yogyakarta dan Paku alam tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18 (Atmakusumah, 2011).

Karaton Yogyakarta merupakan salah satu objek wisata yang tak pernah membosankan. Beragam tradisi dalam Karaton Yogyakarta merupakan pencerminan identitas budaya bangsa (Arwan Tuti Artha, 2000). Sikap konsisten Karaton Yogyakarta untuk tetap mempertahankan adat serta tradisi yang dimiliki menjadikannya kota yang sarat akan budaya dan juga menjadi daerah tujuan wisata bagi para wisatawan untuk mengenal dan mempelajari adat dan tradisi Jawa.

Yogyakarta memiliki beberapa julukan seperti kota pelajar, kota wisata dan kota budaya. Julukan sebagai kota budaya adalah karena rakyat Yogyakarta secara konsisten mempertahankan tradisi yang mereka miliki, hal itu terlihat dari berbagai upacara tradisional yang sampai saat ini kerap dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta, terutama dalam menyambut hari-hari tertentu seperti *grebeg maulud* dan *sekaten*. Menjadikan Yogyakarta sebagai kota budaya adalah usaha yang

dilakukan oleh masyarakat dan tertulis dalam Peraturan Daerah (Perda) Yogyakarta, hal itu bertujuan agar Yogyakarta selalu menjaga kebudayaan masyarakat, sehingga kebudayaan Yogyakarta tidak hilang di tengah-tengah keberadaan budaya lain (Ratna Dwi Nurhajarini, 2012).

Beberapa julukan yang melekat pada kota Yogyakarta menjadikan kota ini “istimewa”, kedudukan “istimewa” yang dimiliki Yogyakarta bukan hanya sekedar sebuah julukan karena Yogyakarta memiliki otonomi khusus dengan bentuk kesultanan melainkan juga karena Yogyakarta sebuah kota “istimewa” dalam segi seni budaya serta pariwisatanya. Kehidupan seni budaya merupakan unsur penting bagi masyarakat Yogyakarta, hal itu karena para raja yang memerintah Yogyakarta pada umumnya pecinta seni budaya (Kutoyo Sutrisno, n.d.). Kecintaan raja terhadap seni dan budaya membuat Karaton Yogyakarta terus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang mereka miliki, disamping itu rakyat Yogyakarta sendiri ikut mendukung dalam upaya mencitrakan kota Yogyakarta sebagai sebuah kota budaya.

Karaton Yogyakarta memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan, hal itu telah berlangsung sejak awal masa kolonial (Ratna Dwi Nurhajarini, 2012). Keberadaan karaton yang masih eksis hingga saat ini menjadikan Yogyakarta menjadi sebuah kota budaya. Untuk menjaga agar kebudayaan yang dimiliki masyarakat Yogyakarta tidak terkikis di tengah kehidupan modern maka Dewan Kebudayaan Yogyakarta (DKY) berusaha untuk menyusun sebuah Perda Yogyakarta sebagai kota budaya. Meskipun tanpa adanya Perda tersebut masyarakat Yogyakarta tetap memiliki kesadaran untuk mempertahankan citra Yogyakarta sebagai kota budaya, kecintaan masyarakat Yogyakarta terhadap budaya diteladani dari raja mereka yang juga mencintai kebudayaan serta kesenian.

Yogyakarta memiliki aset yang menjadikannya sebagai sebuah kota budaya, dengan karaton sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan. Aset tersebut merupakan tradisi yang terkait dengan ritual dan hiburan (Ratna Dwi Nurhajarini, 2012). Karaton sebagai pusat budaya merupakan institusi yang memiliki kewajiban untuk melestarikan segala macam tradisi yang dimiliki, hal tersebut diwujudkan

dengan karaton sebagai penyelenggara dari upacara tradisi disertai partisipasi aktif dari rakyat Yogyakarta.

Upacara tradisi yang dimiliki Karaton Yogyakarta sangat beragam, seperti upacara *sekaten*, *grebeg maulud* dan *dhaup ageng*. *Dhaup ageng* yang merupakan tradisi pernikahan ala Karaton Yogyakarta merupakan tradisi yang prosesinya menarik perhatian masyarakat, tradisi ini mengasimilasi adat feodal dengan zaman modern sehingga menjadikan Yogyakarta hati bagi dunia (Media Indonesia 2011: 5). Meski pada perkembangannya prosesi *dhaup ageng* mengalami penyederhanaan tetapi tradisi ini tetap menjadi hiburan dan sebagai bentuk upaya pelestarian budaya yang dikagumi oleh masyarakat dan wisatawan.

Pernikahan di lingkungan Karaton Yogyakarta dianggap sebagai kewajiban keagamaan (Darban Ahmad Adaby, 2002). Latar belakang keluarga, status sosial dan kepribadian merupakan aspek penting untuk memilih pasangan hidup bagi para bangsawan karaton (Darban Ahmad Adaby, 2002). Seiring dengan perkembangan zaman, aspek penting yang menjadi pertimbangan pihak karaton dalam memilih pasangan hidup mengalami perubahan, meskipun begitu bibit, bebet dan bobot masih tetap diperhatikan dalam memilih calon pasangan. Hal itu dimaksudkan agar mendapat pasangan yang baik dan keluarga yang bahagia.

Prosesi dalam *dhaup ageng* begitu beragam, setiap ritual memiliki makna yang kemudian disimbolkan dalam setiap prosesi adat. Prosesi tersebut antara lain *siraman*, *tantingan*, *midodareni*, *panggih (pondhongan)*, *tompo koyo*, *dhahar klimah* (Media Indonesia 2011: 5). Setiap prosesi yang dilakukan oleh calon pengantin memiliki harapan tertentu bagi kelancaran acara pernikahan serta bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani nantinya.

B. Prosesi dalam *Dhaup Ageng* Karaton Yogyakarta Tahun 2011-2013

Karaton Yogyakarta memiliki sebuah tradisi unik dalam melaksanakan pernikahan, pada masa Sultan Hamengkubuwono X pernikahan putri raja dinamakan *dhaup ageng* yang berarti hajad seorang raja ketika menikahkan anak perempuannya, upacara *dhaup ageng* hanya digelar jika calon mempelai wanita merupakan putra atau putri raja yang lahir dari seorang permaisuri (admin, 2017).

Sultan Hamengkubuwono X merupakan raja yang melakukan pernikahan monogami atau hanya memiliki satu istri saja. Pernikahan Sultan Hamengkubuwono X dengan GHR Hemas dikaruniai lima orang puteri, hal ini berarti semua pernikahan puteri sultan dilaksanakan dengan upacara *dhaup ageng*.

Prosesi pernikahan yang dijelaskan dalam artikel ini merujuk pada upacara *dhaup ageng* GKR Bendara pada tahun 2011 dan GKR Hayu pada tahun 2013. Mengapa pernikahan GKR Bendara di tahun 2011 menjadi batas awal penelitian ini dikarenakan pernikahan GKR Bendara berbeda dengan pernikahan ketiga putri Sultan Hamengkubuwono X sebelumnya, pada pernikahan GKR Bendara resepsi yang dilaksanakan sedikit berbeda yaitu dengan dilakukan di Bangsal Kepatihan mengulangi tradisi pernikahan pada masa Sultan Hamengkubuwono VII. Sedangkan tahun 2013 dijadikan batas akhir dari penelitian ini karena GKR Hayu merupakan putri keempat sekaligus putri terakhir Sultan Hamengkubuwono IX yang menikah.

Pakem dan paugeran, tata cara, dan peraturan dalam pernikahan menjadi salah satu tradisi yang masih dipegang erat di lingkungan Keraton Yogyakarta (Syamsi Indra, 2012). Sebagai sebuah pusat kebudayaan, Keraton Yogyakarta masih konsisten menjaga tradisi pernikahan khas yang dimilikinya. Setiap prosesi dalam *dhaup ageng* dilakukan demi mencapai kesempurnaan acara pernikahan serta memiliki tujuan dan maksud tertentu yang sarat akan makna.

Dhaup ageng dimulai dari prosesi lamaran, majang dan pasang tarub, *nyantri*, siraman, tantingan, midodareni, akad nikah, panggih, tompo koyo, dhahar klimah, kirab, resepsi dan pamitan (admin, 2017). Prosesi unik dari *dhaup ageng* adalah *nyantri* yang merupakan upacara peyambutan calon mempelai pria beserta seluruh keluarganya untuk memasuki lingkungan Keraton Yogyakarta. *Nyantri* diibaratkan sebagai proses memperkenalkan calon mempelai pria mengenai adat istiadat, peraturan, serta keseharian keluarga kerajaan (admin, 2017).

Prosesi *nyantri* terbilang unik karena calon mempelai pria yang berasal dari luar lingkungan keraton harus *dipingit* guna mendapatkan pembekalan mental bagi calon pengantin pria, mengenalkan adat istiadat, peraturan dan kehidupan keraton,

hal ini dilakukan biasanya oleh calon pengantin pria yang berasal dari luar karaton, bertujuan agar sebelum calon pengantin pria hidup di lingkungan karaton mereka sudah mengetahui seluk beluk kehidupan karaton, sehingga dapat beradaptasi. Sedangkan, jika pengantin wanita yang berasal dari luar karaton maka prosesi ini dinamakan *nyengker* yaitu proses *pingitan* calon pengantin perempuan, sebelum acara pernikahan berlangsung (Hayati Istiqomatul, 2024).

Prosesi *nyantri* pada pernikahan GKR Bendara berbeda dengan masa lalu karena sudah mengalami penyederhanaan, menurut kerabat karaton, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, menjelaskan, dahulu proses *nyantri* berlangsung 40 hari. Kini proses *nyantri* dipersingkat menjadi satu hari. "Ada sedikit modifikasi dalam ritual *nyantri*, tetapi pakem (aturan baku) tetap dijalankan. Penyingkatan waktu *nyantri* sejak zaman Sultan HB VII (ABK, 2011).



Gambar 1: prosesi *nyantri*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)



Gambar 2: prosesi menjadi *abdi dalem*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)

Prosesi selanjutnya adalah *majang* dan *pasang tarub*, inti dari upacara *majang & pasang tarub* ini adalah menghias tempat-tempat yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan seluruh prosesi *dhaup ageng*. Tentunya tidak hanya menghias, tetapi juga memohon agar semua pelaksanaan acara berlangsung dengan lancar. Di dalam keraton semua ini disimbolkan dengan memasang hiasan dan sesaji. Pihak penanggungjawab acara *Dhaup Ageng* akan memasang *bleketepe* yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang masih muda (*janur*) di atas atap. Selanjutnya, *tarub* atau hiasan janur yang dibuat melengkung dan *tuwuhan* yang terdiri dari pohon, daun dan biji-bijian tertentu akan dipasang di beberapa lokasi di dalam keraton (admin, 2017).



Gambar 3: *pasang tarub*

Sumber: (Hendra Krisdianto, 2013)

Prosesi selanjutnya adalah sebuah ritual yang kondisional, karena tidak semua *dhaup ageng* melaksanakan prosesi ini. *Plangkahan* bersifat kondisional hanya jika pengantin wanita *melangkahi* kakaknya untuk menikah lebih dulu. Hal itu dilakukan sebelum akad nikah berlangsung, karena prosesi ini berarti bahwa adik memohon restu dari kakak yang 'dilangkahi'. Ketika adik yang 'melangkahi' kakak maka harus ada yang diberikan sebagai tanda permohonan dari adik agar direstui oleh sang kakak untuk menikah lebih dulu. Sebelum akad nikah berlangsung sang adik harus mengantungi izin untuk mendahului sang kakak.

Plangkahan memiliki makna bahwa sang kakak yang 'dilangkahi' memiliki jiwa besar meskipun didahului menikah oleh sang adik, di sisi lain prosesi ini merupakan bentuk penghormatan dari sang adik kepada sang kakak dan sebuah bentuk pernyataan sayang dari sang kakak kepada sang adik serta sebagai sebuah doa untuk kebahagiaan sang adik (Kedaulatan Rakyat 2011: 7). Prosesi itu menjadi wajib dilakukan dalam tradisi pernikahan di Karaton Yogyakarta jika adik ingin mendahului kakaknya untuk menikah, hal itu karena bagi masyarakat Jawa 'melangkahi' sesungguhnya merupakan hal yang tabu untuk dilakukan tetapi jika prosesi tersebut dilakukan sesuai prosedur maka hal tersebut boleh dilakukan.

Setelah *plangkahan*, prosesi selanjutnya adalah *siraman*. Prosesi ini dijelaskan seperti kutipan berikut.

Ritual ini dilakukan pada jam 10.00-15.00 sehari sebelum *panggih manten* atau bertemunya sang pengantin dalam situasi yang sakral. Air siraman yang digunakan untuk ritual ini adalah air yang dicampur dengan beberapa macam bunga, antara lain bunga *sritaman* terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga, kemudian juga ada daun kluwih, daun kara, daun apa-apa, daun awar-awar, daun turi, daun dhadap srep, daun alang-alang dan daun dlingo bingle (Jandra M, 1991).

Siraman memiliki makna membersihkan atau mensucikan kedua mempelai dari segala keburukan secara lahir dan batin. *Siraman* dilakukan oleh ibu, calon ibu mertua, serta kerabat calon mempelai wanita yang dituakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk doa restu yang diberikan bagi kedua calon mempelai. Prosesi *siraman* dilakukan diwaktu dan tempat yang terpisah. Siraman pertama diperuntukkan bagi calon mempelai wanita, di *Bangsal Sekar Kedhaton*. Calon mempelai wanita dimandikan dengan menyiramkan air yang diambil dari tujuh sumber mata air yang dicampur dengan bunga-bunga. Usai memandikan calon mempelai wanita, air dari tujuh sumber beserta kerabat yang memandikan mempelai wanita diboyong

menuju *Bangsas Kasatriyan* untuk melakukan prosesi siraman bagi calon mempelai pria.

Setelah melakukan prosesi siraman, kedua calon mempelai kemudian di rias untuk melaksanakan prosesi selanjutnya. Riasan yang umumnya dikenakan terhadap pengantin wanita adalah mengerik rambut halus pada dahi & tengkuk untuk dibuat *cengkorongan* atau pola riasan *paes ageng* (admin, 2017).

Setelah *siraman* kemudian dilanjutkan dengan potong rambut dan *ngerik* agar calon pengantin sudah bersih ketika tiba saatnya untuk prosesi ijab kabul.



Gambar 4: prosesi *siraman*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)

Tantingan dan *midodareni* adalah prosesi selanjutnya setelah *siraman*, ritual ini dilaksanakan di emper Kagungan Dalem Bangsal Prabayeksa. *Tantingan* adalah ketika Sultan sebagai raja sekaligus orang tua menanyakan kesiapan dari putrinya untuk dinikahkan. Setelah sang putri menyatakan kesediaannya untuk dinikahkan, maka ritual *tantingan* selesai.

Sedangkan *midodareni* sendiri berasal dari kata “widodari atau “bidadari”, merupakan acara berkumpul dan duduk bersama. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa pada malam itu secara gaib para bidadari hadir di tengah-tengah pengantin wanita dalam perjamuan suci (Drs. M. Jandra 1991: 131). Malam *midodareni* bertujuan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala rencana tidak ada halangan dan berdoa agar pengantin wanita diberikan kecantikan lahir dan batin. Kedua ritual dilakukan pada malam sebelum ijab kabul, bertujuan agar calon pengantin wanita meyakinkan diri sebelum masukke ritual sakral yaitu ijab kabul.



Gambar 5: prosesi *tantingan*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)



Gambar 6: *midodareni*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)

Ijab kabul ada prosesi inti dari *dhaup ageng* yang merupakan akad nikah itu sendiri, dilaksanakan keesokan harinya setelah prosesi *tantingan* dan *midodareni*. Ritual ijab kabul merupakan pernyataan adanya hubungan perkawinan antara mempelai pria dan wanita yang dilakukan di hadapan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata 'ijab' dan 'kabal'. 'Ijab' dilakukan oleh wali dari pihak wanita yaitu Sultan dan 'kabal' adalah pernyataan menerima yang dilakukan oleh mempelai pria (Jandra M, 1991). Ritual ini menandakan kedua pengantin telah sah menjadi sepasang suami istri. Prosesi ijab kabul pada *dhaup ageng* Karaton Yogyakarta dilakukan di Dalem Masjid Panepen (Pringgawidagda Suwarna, 2006). Ketika ritual ijab kabul yang diperbolehkan hadir hanya kerabat karaton laki-laki saja, sedangkan calon pengantin dipisahkan sebelum akhirnya ijab kabul diucapkan.



Gambar 7: prosesi *ijab kabul*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)

Setelah prosesi *ijab kabul* dilakukan maka prosesi selanjutnya adalah *upacara panggih* yang prosesinya sebagai berikut.

Upacara panggih merupakan prosesi bertemunya sepasang pengantin setelah sah menjadi suami istri. Mempelai pria yang datang dari *Kasatriyan* serta mempelai wanita dari *Sekar Kedhaton* dipertemukan di *Tratag Bangsal Kencana*. Secara bergantian pengantin pria yang membawa 4 gulungan daun sirih (*gantel*) melemparkan terlebih dahulu secara berlahan-lahan kepada pengantin wanita yang membawa 3 buah *gantel*. Selanjutnya, pengantin wanita akan membasuh kaki pengantin pria dan dilanjutkan dengan memecah telur (admin, 2017).

Ketika kedua pengantin duduk di pelaminan merupakan sebuah puncak dari rangkaian upacara perkawinan dan penuh kehormatan. Para tamu yang hadir akan memberikan selamat serta doa restu kepada pengantin. *Upacara panggih* dalam *dhaup ageng* menandakan bahwa setelah sah menjadi suami istri maka keduanya diperkenankan untuk bertamu karena sudah menjadi *mahrom*, selain itu juga bertujuan untuk memperoleh pengukuhan secara adat atas perjodohan kedua insan yang terikat tali pernikahan. Pada prosesi *upacara panggih* termasuk di dalamnya adalah prosesi *pondhongan* yang dijelaskan sebagai berikut:

Pada upacara panggih ini juga dilakukan prosesi *Pondhongan*. *Pondhongan* adalah mengangkat mempelai wanita dengan kedua tangan, yang dilakukan oleh mempelai pria dan paman mempelai wanita. Mempelai wanita *dipondong* dalam posisi duduk setinggi pundak keduanya. Prosesi *pondongan* ini dilaksanakan di depan seluruh keluarga beserta tamu undangan yang hadir sebagai perlambang menghormati kedudukan sang mempelai wanita sebagai putri Sultan dari permaisuri. Usai prosesi panggih rombongan pengantin diboyong ke *Kasatriyan* untuk melakukan prosesi selanjutnya (admin, 2017).

Prosesi *pondhongan* memiliki makna bahwa pengantin wanita derajatnya lebih tinggi dari pengantin pria serta sebagai ungkapan tanggung jawab, melindungi dan menjaga putri Sultan yang kini telah menjadi istrinya (wawancara dengan Prof. Djoko Suryo, UGM). Prosesi ini merupakan sebuah prosesi yang khas dan hanya boleh dilakukan oleh pihak Karaton Yogyakarta Hadiningrat saja karena merupakan simbolisasi bahwa sang istri merupakan putri Sultan yang status sosialnya lebih tinggi dibandingkan suami. Selain itu, prosesi *pondhongan* juga memiliki makna bahwa ketika telah memasuki kehidupan rumah tangga maka suami menghormati istri dan siap untuk menjaga serta melindungi istri. Makna lainnya adalah bahwa tempat perempuan lebih terhormat dan kedudukan perempuan sangat penting karena berperan dalam meneruskan generasi (wawancara dengan Prof. Djoko Suryo, UGM).



Gambar 8: prosesi *pondhongan*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)

Setelah *pondhongan*, rangkaian *upacara panggih* dilanjutkan dengan *tompo koyo* yang disebut juga dengan *kacar kucur atau bebak-kawak*. *Tompo koyo* adalah penerimaan barang-barang dari pengantin laki-laki berupa kacang tanah, kedelai, jagung, gabah, beras, bunga siraman, uang logam dan dilingo bingle. Hal tersebut memiliki makna bahwa suami tidak boleh bersifat picik, semua jerih payah harus diberikan kepada istri dan sang istri harus pandai dalam mengatur perekonomian rumah tangga sehingga tidak terjadi pemborosan. Prosesi *tompo koyo* merupakan balasan dari prosesi *pondhongan* dimana istri diharapkan menghormati suami dan harus menerima apapun yang diberikan oleh suami sebagai pencari nafkah.

Rangkaian terakhir dari *upacara panggih* adalah *dhahar klimah* merupakan prosesi perjamuan makan kedua mempelai pengantin. Mempelai pria akan mengepal nasi beserta lauk pauknya berjumlah tiga buah. Nasi kemudian diberikan kepada mempelai wanita

untuk dimakan (admin, 2017). Makna dari prosesi *dhahar klimah* adalah bahwa kedua pengantin kelak akan membantu satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup, segala hasil jerih payah merupakan milik berdua. Selain itu prosesi tersebut juga berarti suami harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarga serta akan saling memegang dua *kalimah* syahadat dalam keadaan apapun (Drs. M. Jandra 1991: 165).



Dahar Walimah is a ritual where the groom make three lump or rice...

Gambar 9: prosesi *dhahar klimah*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)



Gambar 10: prosesi *dhahar klimah*

Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)

Setelah seluruh rangkaian dari *upacara panggih* selesai dilaksanakan, maka prosesi terakhir dalam *dhaup ageng* adalah *kirab* yaitu sebuah prosesi dimana kedua pengantin menaiki kereta dan diarak dari Karaton Yogyakarta menuju Bangsal

Kepatihan. Hal itu bertujuan untuk mengenalkan pengantin kepada masyarakat luas (Kompas 2011: 24). Makna dari *kirab* adalah kedua pengantin dikenali oleh masyarakat luas dan mengumumkan bahwa putri Sultan telah melangsungkan pernikahan. Setelah sampai di Kepatihan maka akan dilakukan resepsi pernikahan yang penjelasannya sebagai berikut.

Sesampainya di Kepatihan, prosesi resepsi dilaksanakan. Yang membedakan resepsi *dhaup ageng* dengan resepsi pada umumnya adalah ditampilkannya tarian-tarian adat Kraton Yogyakarta. Tarian yang ditampilkan dalam upacara resepsi pernikahan keraton adalah *Beksan Bedaya Manten (Sanghaskara)* dan *Lawung Ageng*. *Bedaya Manten* ditarikan oleh enam penari wanita yang masih gadis. Dua penari wanita berperan sebagai sepasang pengantin, dan empat lainnya sebagai penari *Srimpi*. Tarian ini menyimbolkan perjalanan kedua pasang mempelai menuju gerbang rumah tangga. Sedangkan *Beksan Lawung Ageng* ditarikan oleh 12 penari pria. Tarian ini merupakan tarian keprajuritan (ciptaan Sri Sultan Hamengku Buwono I), yang mengisahkan jiwa patriotisme yang tertanam dalam sanubari para prajurit Yogyakarta .



Gambar 11: prosesi *kirab*
Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)



Gambar 12: prosesi *kirab*
 Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)



Gambar 13: resepsi pernikahan
 Sumber: (Deyna & Hartawan Arief Oyikk, 2021)

Pamitan adalah suatu proses setelah seluruh rangkaian *dhaup ageng* dilaksanakan, prosesi ini merupakan yang paling terakhir yaitu dimana kedua pengantin akan tinggal di kediamannya sendiri seperti dijelaskan sebagai berikut.

Setelah resepsi usai diselenggarakan, kedua mempelai pengantin melakukan prosesi terakhir rangkaian pernikahan yaitu *pamitan*. Pada masa sebelum Sri Sultan Hamengku Buwono IX, upacara ini dikenal dengan nama *Upacara Jangan Menir*. Pasangan pengantin akan mengenakan busana *Jangan Menir*, dimana pengantin putri khususnya masih mengenakan *paes*. *Upacara Jangan Menir* disederhanakan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dimana pasangan pengantin berikhtisar memohon pamit untuk meninggalkan keraton menuju kediaman masing-masing. Sejak dulu, setelah menikah baik putra

maupun putri Sultan akan keluar dari keraton untuk tinggal bersama pasangannya masing-masing membina rumah tangga baru (admin, 2017).

Prosesi *pamitan* merupakan prosesi penutup dari *dhaup ageng* yang diselenggarakan kurang lebih selama tiga sampai empat hari. *Dhaup ageng* Karaton Yogyakarta Hadiningrat merupakan sebuah tradisi yang selalu menarik minat dan perhatian masyarakat Yogyakarta maupun wisatawan, setiap prosesi selalu memiliki filosofi yang sarat akan makna. Semuanya dilakukan bukan tanpa arti, selalu ada tujuan dan makna tersembunyi yang di dalamnya terdapat pelajaran hidup. Karaton Yogyakarta sebagai pusat budaya telah melakukan tugasnya dengan mempertahankan upacara adat di lingkungan Karaton, meskipun beberapa upacara mengalami penyederhanaan tetapi tidak menghilangkan pakem maupun makna dari setiap prosesinya, hal tersebut membuktikan bahwa Karaton Yogyakarta yang masih eksis hingga hari ini selalu berupaya untuk melestarikan setiap kebudayaan yang dimilikinya sebagai daerah ‘istimewa’

Rangkaian *dhaup ageng* pada masa Sultan Hamengkubuwono X tentu berbeda dengan periode Sultan sebelumnya, pertama adalah karena Sultan Hamengkubuwono X hanya memiliki satu permaisuri dan hanya dikaruniai anak perempuan sehingga semua pernikahan kelima putrinya disebut sebagai *dhaup ageng*, hal ini membuat prosesi *pingitan* yang dilakukan oleh pengantin laki-laki disebut *nyantri* bukan *nyengker*. Perbedaan kedua dari *dhaup ageng* pada masa Sultan Hamengkubuwono X dengan periode sebelumnya adalah penyingkatan setiap prosesi seperti *nyantri* yang biasanya dilakukan selama 40 hari menjadi hanya satu hari saja. Penyederhanaan prosesi pernikahan maupun memang sudah dilakukan sejak masa Sultan Hamengkubuwono IX karena dipengaruhi oleh budaya-budaya luar (Febriantiko, 2014).

Dhaup ageng GKR Bendera pada tahun 2011 merupakan pernikahan pertama dalam sejarah karaton yang seluruh rangkaian prosesnya didokumentasikan dan dijadikan suatu film utuh sehingga dapat ditonton secara gratis di kanal *youtube* Karaton Yogyakarta, ini menunjukkan keseriusan karaton untuk mengabadikan suatu tradisi karaton agar bisa dinikmati, dipelajari dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Hal ini yang membedakan pernikahan

GKR Bendara dengan pernikahan dengan ketiga putri Sultan yang lebih dulu menikah, dimana semua prosesi *dhaup ageng* dijadikan sebuah film dokumenter agar dapat dikenang dan menjadi sumber inspirasi bagi para penontonnya untuk terus melestarikan tradisi yang dimiliki.

KESIMPULAN

Upacara ritual pernikahan Karaton Yogyakarta Hadiningrat, *dhaup ageng*, di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat berperan penting dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya adiluhung Yogyakarta, terutama di tengah arus modernitas. Meskipun upacara ini memiliki nuansa kerajaan tradisional, dampaknya dianggap positif karena Karaton secara konsisten berkomitmen untuk mempertahankan praktik-praktik tradisionalnya. Hal ini ditegaskan oleh para ahli seperti Clifford Geertz dan Ahmad Adby Darban yang menekankan bahwa upacara ini bukan sekadar seremoni, tetapi memiliki makna sosial, budaya, dan religius yang mendalam. Ritual-ritual ini mengandung nilai-nilai seperti penghormatan, tanggung jawab, dan harmoni, yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Ritual-ritual seperti *nyantri* (persiapan mempelai pria) hingga prosesi utama *panggih* (pertemuan mempelai pria dan wanita) sarat dengan simbol-simbol yang bertujuan untuk memastikan kelanggengan dan keharmonisan pernikahan. Sejarawan ahli Karaton dari Universitas Gajah Mada (UGM), seperti Djoko Suryo menyoroti peran penting tradisi ini dalam menanamkan nilai-nilai saling menghormati, tanggung jawab, dan pelestarian struktur sosial. Proses-proses seremonial tersebut juga mencerminkan kemampuan Karaton untuk beradaptasi dengan zaman modern sambil tetap mempertahankan inti nilai-nilai budaya, menunjukkan pendekatan yang dinamis namun teguh terhadap tradisi.

Dhaup ageng bukan sekadar pernikahan tradisional, melainkan praktik budaya yang terjaga dengan baik yang memperkuat identitas Yogyakarta sebagai pusat budaya. Hal ini menunjukkan peran penting Karaton dalam menjaga dan menyebarluaskan tentang budaya Jawa, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pentingnya tradisi ini memberikan inspirasi yang berharga, terutama bagi generasi

muda, dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan warisan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmakusumah. (2011). *Tahta Untuk Rakyat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darban Ahmad Adaby. (2002). *Kraton Jogja* (Chamamah Soeratno (ed.)). Indonesia Marketing Association.
- Deyna, H., & Hartawan Arief Oyikk. (2021). *Dhaup Ageng*. <https://www.youtube.com/watch?v=uRTgMadpLSM&t=3620s>
- Febriantiko, H. T. (2014). Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubono VIII Dan IX. *AVATARA, Journal Pendidikan Sejarah*, 2(2), 99–104.
- Hayati Istiqomatul. (2024). *Dhaup Ageng Pura Pakualaman, Mengenal Prosesi Nyengker Calon Mempelai*. Tempo. <https://www.tempo.co/hiburan/dhaup-ageng-pura-pakualaman-mengenal-prosesi-nyengker-calon-mempelai-100049>
- Hendra Krisdianto. (2013). *Prosesi Pasang Tarub Royal Wedding Keraton Yogyakarta*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/images/editorial/view/850101/prosesi-pasang-tarub-royal-wedding-keraton-yogyakarta>
- Jandra M. (1991). *Perangkat/Alat-alat dan Pakaian serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Kraton Yogyakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. (1994). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang.
- Kutoyo Sutrisno. (n.d.). *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Lombard Denys. (2000). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Kosentris*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pringgawidagda Suwarna. (2006). *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. Kanisius.
- Ratna Dwi Nurhajarini. (2012). *Yogyakarta dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*. Balai Pelestarian Sejarah.
- Seomardjan Selo. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Komunitas Bambu.
- Syamsi Indra. (2012). *GKR Hemas Ratu di Hati Rakyat*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Skripsi:

- Indryani, Dytha Adelia Indryani. 2014. "Tradisi Pernikahan di Keraton Yogyakarta 1973-2013." Skripsi, Universitas Negeri Jakarta.

Surat kabar:

- Hayati, Istiqomatul. "Dhaup Ageng Pura Pakualaman, Mengenal Prosesi Nyengker Calon Mempelai." *Tempo*, 8 Januari 2024.
- Helabumi, Raditya. "Kita Masih Memiliki Kebesaran Itu." *Kompas*, 19 Oktober 2011.
- Kurniawan, Aloysius B. "Memutar Sejarah Tradisi Pernikahan Raja." *Kompas*, 12 Oktober 2011.
- Lesmana, Surya Adi. "Latihan Phondongan Diulang Sampai 4 Kali." Yogyakarta: *Kedaulatan Rakyat*, 14 Oktober 2011.
- Putro, Effy Widjono. "Pelangkahan Itu Dipilih GRAJ Abra Sendiri." Yogyakarta: *Kedaulatan Rakyat*, 17 Oktober 2011.
- Riatmoko, Ferganata Indra. "Ritual Dimodifikasi, tetapi Tetap Sesuai Pakem." *Kompas*, 17 Oktober 2011.
- Ulya, Furqon Himawan. "Melestarikan Adat Feodal di Zaman Modern." *Media Indonesia*, 16 Oktober 2011.

Wawancara:

- Wawancara. Djoko Suryo, Profesor, Universitas Gadjah Mada. 2014.
- Wawancara. KRT Djatiningrat, Yogyakarta. 2014.
- Wawancara. KRT Pujaningrat, Yogyakarta. 2014.

Internet:

- Suryadinata, Leo. 1971. "Pre-War Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese." *Indonesia*. (11): 83–94. Diunduh 7 Januari, 2023 (<http://www.jstor.org/stable/3350745>).
- "Yogyakarta Hadiningrat Adat." *Kerajaan Nusantara*. Diakses dari <http://www.kerajaanusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/adat/>, diakses pada 22 Mei 2014.
- Artikel Galeri Pernikahan." *Weddingku*. Diakses dari <http://id.m.weddingku.com/article-gallery.asp?aricleid=1015965>, diakses pada 23 Mei 2014.

Untuk situs web:

- ABK. (2011). *Ritual Dimodifikasi, tetapi Tetap Sesuai Pakem*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2011/10/17/03011926/index.html#google_vignette
- admin. (2017). *Dhaup Ageng*. Karaton Yogyakarta Hadiningrat. <https://www.kratonjogja.id/hajad-dalem/3-dhaup-ageng/>